

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada perekonomian di Indonesia saat ini yang berbasis ekonomi nasional dapat ditemukan pada sektor koperasi. Sektor koperasi merupakan suatu organisasi ekonomi yang dijalankan oleh para anggotanya sebagai salah satu perekonomian nasional dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi berdasarkan UU koperasi No. 25 Tahun 1992 pasal 3, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Khafid dkk (2010) Untuk mencapai tujuan koperasi maka koperasi harus dikelola dengan baik dan profesional. Selain itu, karena status koperasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat, koperasi juga sangat penting bagi perekonomian saat ini.

Perkembangan koperasi saat ini cukup pesat terbukti dengan banyaknya koperasi-koperasi yang bermunculan. Menurut Departemen Koperasi dan UKM (2019) melalui [depkop.go.id](http://depkop.go.id), jumlah koperasi di Indonesia mencapai 123.048. Dengan jumlah anggota sebesar 22.463.738. Dengan meningkatnya perkembangan koperasi, maka suatu koperasi dapat dikatakan berhasil apabila adanya pembangunan dan pengembangan melalui proses yang berkelanjutan dan tersistem serta memiliki pengelolaan laporan keuangan koperasi dengan baik dan profesional. Selain itu pentingnya pengelolaan laporan keuangan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan menyediakan informasi mengenai posisi laporan keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan stakeholder lainnya dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan hasil dari pencatatan informasi keuangan pada periode tertentu yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Menurut PSAK No.1 (2015:1) Menyatakan bahwa laporan keuangan adalah representasi terstruktur dari status keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Penyusunan laporan keuangan hendaknya sesuai dengan standar yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 8 April

2011 tentang Exposure Draft yaitu Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) 8 tentang pencabutan PSAK 27 Akuntansi Perkoperasian. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 27 adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standard* atau IFRSs) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS. Sebagai pengganti dari PSAK 27 tentang akuntansi perkoperasian maka IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pada tanggal 17 Juli 2009 telah menerbitkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas) dan telah disahkan DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK ETAP bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah termasuk koperasi. Menurut SAK ETAP (2009) Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal (pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit).

Pelaporan keuangan menurut IAI dalam SAK ETAP (2009) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan pelaporan keuangan terdiri dari 5 laporan yaitu : (1) laporan neraca, (2) laporan laba rugi, (3) laporan perubahan ekuitas, (4) laporan arus kas dan (5) catatan atas laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan yang telah ditentukan oleh IAI yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan IAI (2002 Hal.7-12). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 12 Tahun 2015 berisi tentang pelaporan koperasi menurut SAK ETAP terdiri dari : (1) Laporan neraca, (2) Perhitungan sisa hasil usaha (Perhitungan Laba Rugi), (3) Laporan perubahan ekuitas, (4) Laporan arus kas, (5) Catatan atas laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan pada KPRI Wiyata Usaha yang merupakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1992 dan terletak di Jl. Krakatau Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. KPRI juga melayani dan memenuhi tanggung jawabnya kepada anggota dengan baik. Bentuk tanggung jawab tersebut diantaranya: pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun kepada anggota dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap

tahunnya. Selain itu KPRI Wiyata Usaha memiliki beberapa usaha antara lain : pertokoan, unit simpan pinjam dan arisan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat dan anggota.

Dari survei yang telah dijelaskan di atas, peneliti melakukan wawancara kepada pihak KPRI Wiyata Usaha untuk mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan koperasi. Diketahui bahwa laporan keuangan koperasi belum disajikan secara lengkap dan belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. KPRI hanya menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan sisa hasil usaha. Ketidaklengkapan dalam penyusunan laporan keuangan memicu terjadinya kecurangan serta informasi yang disajikan tidak relevan dan meningkatkan resiko di dalam proses pertanggungjawabannya. Selain itu keterbatasan informasi akuntansi dan kelemahan pada pelaporan keuangan serta kurangnya pemahaman dalam pengelolaan usaha seperti kurangnya pengalaman pihak koperasi tersebut dalam bidang akuntansi yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak berstandar berakibat pada terbatasnya koperasi tersebut dalam memperoleh bantuan dana dari mitra kerja dan perbankan.

Seiring dengan berjalannya waktu, penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu tentang SAK ETAP semakin banyak. Termasuk penelitian yang telah dilakukan oleh Vebiyanti (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan oleh Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur hanya terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dan belum menyusun laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan SAK ETAP.

Menurut Handayani (2016) menyatakan laporan keuangan yang disusun oleh Kopma Padang Bulan dan Kopma Universitas Kanjuruhan hanya terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas. Sedangkan laporan keuangan yang dibuat oleh Kopma UMM terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Hal ini masih belum sesuai dengan yang distandarkan oleh SAK ETAP.

Sedangkan menurut Hilali (2016) berpendapat bahwa dalam penyusunan laporan keuangan KUD Bina Tani hanya sebatas menyajikan neraca, laporan sisa hasil usaha, dan laporan perubahan ekuitas dan tidak menyajikan laporan arus kas

dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi oleh KUD Bina Tani adalah kurangnya kesadaran pihak koperasi terhadap pentingnya laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar.

Selain itu menurut Prasetyo (2017) menyatakan bahwa hasil penelitian hanya dua koperasi saja yang dapat dikatakan sudah sesuai dengan SAK ETAP, yaitu Koperasi Pilar Utama dan Kopkar Pelita. Baik dari penyajian, dasar pengukuran, sampai metode yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan, mengingat Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No.12 Tahun 2015, bahwa koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik maka diwajibkan laporan keuangannya mengacu pada SAK ETAP.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Octavina, dkk (2017) menyatakan bahwa dari 33 koperasi hanya 3 koperasi yang menyusun laporan keuangan secara lengkap. Dan sisanya 30 koperasi belum menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa belum terimplementasikan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Andita (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dilakukan oleh KUD Tri Jaya hanya berupa neraca dan laporan perhitungan sisa hasil usaha. KUD Tri Jaya tidak membuat membuat laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang dibuat oleh KUD Tri Jaya belum sesuai dengan SAK ETAP.

Dilihat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, terdapat hasil penelitian yang berbeda terkait penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu SAK ETAP. Selain itu obyek yang dilakukan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada KPRI Wiyata Usaha di Kencong.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui laporan keuangan dan implementasi SAK ETAP pada KPRI Wiyata Usaha. Sehingga penelitian ini berjudul

# **Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada KPRI Wiyata Usaha Di Kencong**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi penyajian laporan keuangan pada koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wiyata Usaha di Kencong?
2. Apakah koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wiyata Usaha di Kencong telah menerapkan SAK ETAP?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, diharapkan penelitian ini dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi penyajian laporan keuangan pada koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wiyata Usaha di Kencong.
2. Untuk mengetahui implementasi SAK ETAP pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wiyata Usaha di Kencong.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi tentang pengelolaan laporan keuangan berdasarkan implementasi SAK ETAP pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wiyata Usaha di Kencong.

2. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wiyata Usaha di Kencong

Sebagai masukan untuk pengelola laporan keuangan koperasi agar lebih memahami tentang implementasi SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan. Tujuan diterapkannya SAK ETAP untuk memberikan informasi bagi pihak koperasi dan pihak eksternal dalam mengambil keputusan.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama yaitu implementasi SAK ETAP pada koperasi.

